

Tantangan Indonesia Hadapi Politik Global Setelah Pemilu 2024

ABSTRACT

This article outlines Indonesia's future challenges in its efforts to face increasingly uncertain global political conditions. After the completion of the 2024 elections, Indonesia has a new president, Prabowo Subianto. In the new leadership period, Indonesia will be faced with increasingly complex global political problems. World political situations such as the Israel-Palestine and Ukraine-Russia conflicts which do not yet have a solution will pose an indirect political-economic threat to Indonesia. This influences foreign political challenges and Indonesia's domestic conditions. Specifically, the author analyzes Indonesia's challenges into three things: first, the views of world countries towards Indonesia's foreign policy; second, proxy war which will affect domestic political stability; third, the potential for an economic crisis that will affect Indonesia's economic conditions. The author uses a qualitative method with a realist concept approach from Hans Morgenthau. This article concludes that if these three challenges cannot be overcome, Indonesia will experience quite serious security and social shocks.

Keyword: Election 2024, Prabowo Subianto, Israeli-Palestinian Conflict, Ukrainian-Russian War

ABSTRAK

Tulisan ini mengurai tantangan Indonesia ke depan dalam upaya menghadapi kondisi politik global yang semakin tidak menentu. Setelah selesainya Pemilu 2024, Indonesia memiliki presiden baru, Prabowo Subianto. Indonesia pada masa kepemimpinan yang baru nanti dihadapkan pada permasalahan politik global yang semakin kompleks. Situasi politik dunia seperti konflik Israel-Palestina dan Ukraina-Rusia yang belum memiliki jalan keluar akan memberikan ancaman politik-ekonomi terhadap Indonesia secara tidak langsung. Hal ini berpengaruh pada tantangan politik luar negeri dan kondisi dalam negeri Indonesia. Secara khusus, penulis menganalisa tantangan Indonesia itu ke dalam tiga hal: pertama, pandangan negara-negara dunia terhadap politik luar negeri Indonesia; kedua, proxy war yang akan mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri; ketiga, potensi krisis ekonomi yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konsep realis dari Hans Morgenthau. Tulisan ini menyimpulkan bahwa jika tiga tantangan itu tidak mampu diatasi, maka Indonesia akan mengalami goncangan keamanan dan sosial yang cukup serius.

Kata Kunci: Pemilihan Umum 2024, Prabowo Subianto, Konflik Israel-Palestina, Perang Ukraina-Rusia

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Indonesia telah selesai dan menghasilkan presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto. Ia memenangkan Pemilu dengan hasil unggul 58% dari total suara sah di 36 provinsi secara nasional (Tim DetikNews, 2024). Dengan demikian, Prabowo dinyatakan sah sebagai presiden terpilih dan akan dilantik bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, pada 20 Oktober 2024.

Indonesia memasuki babak sejarah kepemimpinan yang baru. Sebagai presiden terpilih, Prabowo berupaya untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengusung ide “keberlanjutan”. Akan tetapi, tampaknya hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Tantangan-tantangan dalam dunia internasional justru semakin kompleks. Kompleksitas permasalahan politik dunia akan mempengaruhi Indonesia dari segi stabilitas dan keamanan nasional. Indonesia akan mengalami hambatan-hambatan atas permasalahan politik internasional tersebut dan hambatan tersebut akan berdampak kepada kondisi politik di Indonesia. Upaya tata kelola permasalahan hubungan internasional ini perlu mendapatkan sorotan yang penting sebagai langkah mitigasi atas segala ancaman. Dengan demikian, upaya mitigasi ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi yang baik untuk Indonesia.

Penulis menelusuri tantangan-tantangan besar Indonesia dalam menghadapi situasi politik global yang sedang terjadi. Dalam upaya ini, penulis mencoba membedah tantangan apa saja yang patut diperhatikan dan sejauh mana tantangan-tantangan tersebut bisa mempengaruhi goncangan sosial dan keamanan negara. Dengan mengetahui ancaman tersebut, diperoleh pemahaman tentang bagaimana upaya mitigasi tantangan ke depan sebagai pertimbangan kebijakan negara.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai bagian dari proses penelitian. Metode kualitatif menekankan teknik pengumpulan data berupa studi literatur terhadap buku, jurnal, website, dan laporan-laporan. Model kualitatif melakukan proses penelitian berupa konstruksi realitas sosial; interpretasi terhadap peristiwa; melibatkan orisinalitas dan konteks, bersifat tidak bebas nilai; dan menganalisis secara tematik (Gunawan). Penulis mengedepankan interpretasi atas fenomena kondisi politik global yang terjadi dengan menganalisis subyek-subyek yang terlibat.

Dalam menganalisis fenomena politik global, penulis memasukkan pendekatan konsep realisme dari Hans Morgenthau. Hans mengeluarkan enam prinsip dalam politik realis (Morgenthau, 2009), yakni:

1. Realisme politik percaya bahwa politik diatur hukum obyektif yang berasal dari sifat manusia. Realisme meyakini teori rasional menjadi refleksi atas hukum obyektif tersebut.
2. Realisme mengkonsepkan kekuasaan sebagai kepentingan yang menjembatani politik internasional dan fakta. Kepentingan dalam politik luar negeri dimaknai sebagai rasio yang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir resiko suatu bangsa dengan mendasarkan sifat waspada.
3. Realisme menitikberatkan kepentingan sebagai esensi politik dan kategori obyektif. Kepentingan menentukan tindakan politik dalam sejarah.
4. Realisme menyatakan bahwa prinsip moral tidak bisa diimplementasikan dalam tindakan negara. Tidak akan mungkin ada prinsip moral tanpa suatu kewaspadaan.
5. Realisme politik menolak aspirasi identifikasi moral suatu bangsa berdasarkan hukum moral yang umum.
6. Realis politik memprioritaskan bagaimana kebijakan berdampak pada kekuasaan. Realis politik juga menggambarkan manusia

politik seperti binatang yang tidak bisa menahan dirinya untuk memperoleh kekuasaan.

Melalui pendekatan realisme milik Hans, penulis membedah tantangan Indonesia dari segi kepentingan yang berimplikasi kepada politik luar negeri, politik dalam negeri, dan ketahanan ekonomi. Konsep realisme ini membantu penulis dalam mengurai siapa yang berkepentingan dalam politik internasional, seperti apa motifnya, dan bagaimana melihat hal tersebut berpengaruh dalam politik Indonesia. Penggunaan konsep ini diharapkan bisa melahirkan suatu analisis baru terkait dampak politik global, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan kekuasaan, terhadap Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Global dan Blok Politik

Situasi dunia berada dalam ketidakpastian di tengah konflik Ukraina-Rusia dan Israel Palestina. Kedua konflik ini memiliki pengaruh besar terhadap konstelasi politik dunia. Konflik Ukraina-Rusia memiliki signifikansi di ranah Eropa sehingga turut mempengaruhi permintaan dan penawaran. Begitu pula konflik Israel-Palestina yang mendapat sorotan besar kalangan masyarakat dunia dan berpotensi memperburuk situasi. Kedua konflik ini bisa menjadi pemicu masalah yang lebih luas.

Konflik Ukraina-Rusia yang berlangsung merupakan puncak resistensi Presiden Rusia, Vladimir Putin, terhadap barat. Putin melihat Amerika Serikat ingin membentuk skema unipolar di mana hanya Amerika Serikat yang menjadi penguasa tunggal. Amerika Serikat memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk mendesak Rusia dengan menjadikan negara Ukraina sebagai “proyek anti Rusia” (Brunk & Hakimi, 2022). Ukraina yang memiliki kedekatan historis dengan Rusia justru membelot untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization

(NATO) di bawah kepemimpinan Zelensky. Keadaan ini mengancam pertahanan Rusia mengingat Ukraina adalah negara tetangga Rusia secara langsung.

Sejak Februari 2022, Serangan Rusia ke wilayah Ukraina menyebabkan permasalahan ekonomi. Ekonomi dunia saat itu sedang mengalami pemulihan dari transisi wabah Covid-19; konflik Ukraina-Rusia memperparah keadaan ekonomi dunia dengan membuat harga-harga semakin melonjak. Sejak konflik terjadi, harga gas alam Eropa naik lebih dari 30%; gandum naik 40%; harga minyak naik tertinggi selama 10 tahun, yakni sebesar \$130 per barel. Di sisi lain, terjadi fluktuasi indeks saham Eropa dan Amerika Serikat, diikuti dengan pinjaman pemerintah dan inflasi (Kennedy, 2023). Indonesia sempat diuntungkan dari komoditas batu bara yang kenaikannya 60%. Tetapi di luar itu, Indonesia juga dirugikan karena kenaikan bahan baku gandum dan indeks saham yang merosot.

Konflik Ukraina-Rusia juga diikuti polarisasi blok-blok politik. Sebagai bentuk resistensi, Rusia merangkul rekan-rekan negara sejawatnya dalam kelompok antar pemerintah Brazil, Rusia, India, China, South Africa (BRICS) yang terus bertumbuh dan tampak seperti blok Timur baru.¹ Amerika Serikat bersama Uni Eropa (EU) dan NATO juga turut melakukan penguatan blok politik Barat. Mereka memperkuat pertahanannya di Asia Pasifik melalui Australia, Inggris, Amerika Serikat (AUKUS) dan melalui kemitraan Quad yang terdiri dari negara Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India. Fenomena ini seringkali disebut sebagai “new cold war.”

Setelah Eropa, konflik global semakin memanas di beberapa wilayah dunia. Di Asia Selatan, permasalahan Laut China Selatan memicu konflik antara China dan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Filipina dan Taiwan meminta bantuan Amerika Serikat. Taiwan juga memiliki sejarah konflik dengan China dan konfliknya semakin meruncing. Di Asia Timur, Jepang dan Korea Selatan mulai mendekati Amerika Serikat untuk berhadapan dengan Korea Utara yang dekat dengan Rusia. Di Asia Pasifik, sudah ada AUKUS yang menjadi proxy Barat dalam upaya

¹ Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab turut bergabung pada 1 Januari 2024

mempertahankan wilayah di Samudra Pasifik. Ketegangan konflik akan terjadi antara China, India, dan AUKUS.

Ketegangan politik dunia semakin memanas ketika terjadi konflik Israel-Palestina di Timur Tengah. Pasukan Israel membombardir kota Gaza dari darat, laut, dan udara sejak 7 Oktober 2023. Hingga 20 Mei 2024, serangan Israel membunuh 35.562 sipil dan melukai 79.562 sipil. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Hampir 40% populasi Gaza mengungsi lebih dari dua minggu (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Konflik berdampak buruk kepada Palestina. Pertumbuhan real GDP pada September 2023 sebesar turun 86,37% dari tahun sebelumnya. Palestina mengalami kehancuran di bidang ekonomi dengan kehilangan \$1,5 milyar produksi swasta hanya selama dua bulan konflik; kehancuran infrastruktur listrik sekitar \$280 juta; kehilangan penghasilan pekerja sebesar \$20,5 juta (World Bank Economic Monitoring Report, 2024). Mereka hidup menderita akibat serangan Israel tersebut sehingga mendapat perhatian besar dari dunia internasional.

Situasi konflik Israel-Palestina semakin memperuncing ketegangan politik dunia di samping konflik Ukraina-Rusia. Israel sebagai bagian proxy dari barat yang sangat dekat dengan Amerika Serikat menarik ketegangan politik dunia terhadap negara-negara Timur Tengah dan mayoritas Islam. Mereka mengutuk Israel atas serangan yang terjadi. Selain itu, hal ini juga menarik negara-negara yang tidak terlalu berafiliasi dengan Barat untuk mengutuk Israel karena alasan kemanusiaan. Negara-negara seperti Bahrain, Belize, Chile, Bolivia, Chad, Honduras, Yordania, dan Turki memutuskan hubungan diplomatiknya terhadap Israel karena tindakan Israel terhadap Palestina yang tidak manusiawi (CNN Indonesia, 2024).

Dengan adanya konflik Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, disertai blok-blok politik di berbagai wilayah dunia, tampak bahwa keadaan politik ke depan semakin memburuk. Situasi ini membawa negara-negara untuk waspada atas potensi perang terbuka yang akan terjadi. Data yang dirilis dari *Stockholm*

International Peace Research Institute (SIPRI), menunjukkan bahwa belanja militer global pada tahun 2022 mencapai \$2,24 triliun, meningkat 3,7% dari tahun sebelumnya. Capaian belanja militer itu termasuk gaji, pembelian peralatan dan persenjataan, biaya operasional, riset, konstruksi militer, dan administrasi; serta bantuan militer pun ikut termasuk (Saputra, 2023).

Keadaan ini memperlihatkan bahwa kondisi politik global yang semakin tidak pasti akan berimbas kepada persoalan tata kelola negara Indonesia. Sebagai bagian dari negara-negara dunia, Indonesia tidak bisa lepas dari dinamika politik global yang terjadi. Indonesia menjadi bagian dari G20, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Konferensi Asia Afrika (KAA) dan beragam organisasi internasional yang turut serta dalam tatanan politik global. Indonesia juga memiliki sumber daya yang besar, baik alam maupun manusia, sehingga negara ini patut diperhitungkan dalam konstelasi politik dunia. Dengan jumlah penduduk sebesar 280,73 juta jiwa di mana berisikan 140 juta tenaga kerja pada tahun 2023 (Kemnaker, 2024), Indonesia memiliki ketersediaan sumber demografi yang positif dibanding negara-negara yang minus demografi. Indonesia juga memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yakni 55 jutra metrik ton, pada tahun 2023 (Annur, 2024). Sumber daya nikel yang paling dicari saat ini, salah satu sumber daya alam Indonesia, akan menghasilkan kekayaan bagi suatu negara manapun. Hal ini sangat menguntungkan Indonesia pada masa depan jika nikel dikelola dengan baik.

Pengaruh politik global yang memburuk berpotensi besar untuk mengganggu pembangunan yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang telah berhasil melewati Pemilu 2024, Indonesia harus siap menghadapi tantangan yang akan muncul di depan mata dalam menghadapi kondisi demikian. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi akan terdiri dari tiga hal: (1) politik luar negeri; (2) *proxy war*; (3) dan krisis ekonomi.

Dilema Politik Luar Negeri

Keadaan politik dunia yang semakin memburuk memberikan banyak spekulasi. Dalam satu sisi, spekulasi perang bisa mereda jika masing-masing

kekuatan kombatan bersepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan berbagai pertimbangan dan persyaratan. Di sisi lain, spekulasi perang akan meluas di beberapa wilayah. Representasi perang sudah cukup mewakili: perang Ukraina-Rusia mewakili perang yang ada di Eropa dan konflik Israel-Palestina mewakili perang di Timur Tengah. Spekulasi perang bisa meluas di wilayah Laut China Selatan antara China versus negara-negara ASEAN; Selat Taiwan antara China dan Taiwan; wilayah sekitar Laut Jepang antar Korea Utara dan Jepang-Korea Selatan. Jika spekulasi perang meluas, konflik antara blok barat dan timur semakin meruncing. Tidak menutup kemungkinan pasukan bantuan dari masing-masing blok akan turut memberi bala bantuan perang di sekitar wilayah tersebut.

Dalam menyikapi politik global, Indonesia memiliki prinsip politik bebas dan aktif. Secara filosofis, politik ini menekankan pada kepentingan nonblok yang tidak merujuk kepada kepentingan blok manapun. Ide yang lebih ingin dicapai dalam politik bebas dan aktif adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia; melindungi kemerdekaan dan kedaulatan nasional; menentang imperialisme/kolonialisme; serta mendamaikan negara-negara yang berkonflik dan menghormati hak asasi manusia (Kumar, 1997). Ide ini sudah direalisasikan sejak KAA tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung dan terus diimplementasikan.

Presiden Jokowi mengimplementasikan ide politik bebas aktif ke dalam model diplomasi politik luar negeri yang bernama “diplomasi pro rakyat”. Dalam diplomasi ini, Jokowi yang mencitrakan dirinya sebagai “wong cilik” mengedepankan populisme yang berfokus kepada isu domestik dan kepentingan ekonomi. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengedepankan eksistensi Indonesia di tingkat regional dan global, Jokowi cenderung lebih membasiskan diplomasinya kepada keuntungan ekonomi. Jokowi lebih menata urusan politik luar negeri untuk kepentingan dalam negeri. Tiga prioritas yang diandalkan dalam diplomasi pro rakyat antara lain (1) menata kedaulatan Indonesia; (2) memperbesar proteksi masyarakat sipil Indonesia; (3) mengintensifkan diplomasi ekonomi (Andika, 2016).

Pada perkembangannya, Jokowi cenderung kurang aktif dalam percaturan politik global dan lebih fokus dalam menata ekonomi. Jokowi kerap kali tidak hadir dalam panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lantaran praktik diplomasinya. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, Jokowi akhirnya kembali tampil untuk merespon isu-isu politik global yang sangat sensitif. Dalam isu konflik Ukraina-Rusia, Jokowi turut mencoba untuk menghentikan perang antara kedua belah pihak, tetapi mengutuk serangan Rusia ke Ukraina yang cenderung pro barat. Jokowi juga turut mengutuk serangan Israel, terhadap kota Gaza, Palestina. Sejak kehadiran isu-isu tersebut, kiprah Indonesia di dunia internasional melalui Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, kembali berkibar.

Merebaknya isu-isu seperti Ukraina-Rusia dan Israel-Palestina tidak bisa dilepaskan dari kepentingan blok antara Barat dan Timur yang semakin meruncing. Sikap Indonesia yang dilematis terhadap dua isu besar tersebut membuat Indonesia terjebak antara Barat dan Timur. Di satu sisi, Barat melihat Indonesia dalam konteks Israel-Palestina sebagai ancaman secara ideologis, mengingat penduduk Indonesia mayoritas muslim yang banyak mendukung Palestina. Tindakan pemboikotan produk-produk Israel cukup menggoncang ekonomi perang Israel yang merupakan proxy barat. Meskipun demikian, Barat juga sempat diuntungkan dengan pernyataan keras Indonesia terhadap serangan Rusia ke wilayah Ukraina. Di sisi lain, Indonesia masa Presiden Jokowi cenderung dekat dengan China dibanding Amerika Serikat secara hubungan diplomasi melalui proyek-proyek infrastruktur dan konsesi tambang. Di tengah pemulihan ekonomi pasca covid-19, kecenderungan Indonesia untuk mengikuti poros BRICS sangat berpotensi besar.

Tahun 2024 menjadi tantangan besar bagi politik luar negeri Indonesia. Di tengah ancaman politik global yang semakin mengkhawatirkan, dilema kebijakan politik luar negeri Indonesia memberikan suatu hitungan politik yang signifikan bagi negara-negara blok untuk melihat ke arah mana haluan Indonesia. Prinsip-prinsip nonblok yang dimiliki Indonesia perlu diuji konsistensinya secara praktik politik. Sejauh mana Indonesia mampu

menciptakan keseimbangan kekuasaan antara blok Barat dan Timur, tergantung bagaimana arah kepemimpinan politik lima tahun ke depan.

***Proxy war* dan Stabilitas Dalam Negeri**

Dengan semakin memanasnya isu politik global, kecenderungan untuk negara-negara dari blok yang berkepentingan untuk menginfiltrasi negara-negara yang dianggap penting untuk merebut pengaruh adalah suatu keniscayaan. Sejarah menunjukkan, Indonesia selalu berkaitan dengan upaya-upaya infiltrasi seperti ini. Sejak era perang dingin, Indonesia selalu diapit oleh kepentingan negara-negara blok, seperti Mutual Security Act Tahun 1951 dan Poros Jakarta-Pyongyang-Peking Tahun 1965. Upaya-upaya ini salah satunya merupakan upaya merebut pengaruh Indonesia agar merapat pada blok tertentu.

Dalam upaya merebut kepentingan atau melemahkan suatu negara, dikenal konsep *proxy war*. *Proxy war* terjadi sejak era perang dingin. Secara harfiah, *proxy war* merupakan perang perpanjangan tangan yang dilakukan dari satu pihak ke pihak lain dengan memanfaatkan pihak ketiga, bisa melalui aktor negara (*state actor*) maupun aktor nonnegara (*nonstate actor*) (Hidayat & Gunawan, 2017). Dalam *proxy war*, terdapat dua metode penggunaan: *soft power* dan *hard power*. *Soft power* menekankan infiltrasi bidang ekonomi dan budaya, sedangkan *hard power* menekankan infiltrasi bidang militer dan politik.

Tantangan *proxy war* Indonesia ke depan akan menitikberatkan perang asimetris bidang politik. Perang asimetris bersifat bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Pemilu 2024 yang menghasilkan presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan menjadi target dari perang asimetris ini. Ada dua alasan yang melandasi hal tersebut. Pertama, Prabowo dianggap sebagai pewaris tahta Orde Baru karena menjadi menantu Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua. Bagi sebagian aktivis reformasi, Orde Baru adalah rezim pemerintahan yang otoriter dan bertentangan dengan demokrasi. Kedua, Prabowo adalah seorang militer yang memiliki rekam jejak kontroversial dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Rekam jejak perilaku Prabowo pada masa lalu yang ditakuti sebagian orang akan menjadi pemimpin yang melanggar hak asasi manusia. Dua alasan

ini menjadikan Prabowo sebagai target *proxy war* yang dengan mudah menciptakan narasi Prabowo sebagai otoriter dan anti demokrasi. *Proxy war* bisa masuk ke ranah *nonstate actor* seperti oposisi, lembaga nonpemerintah, dan jurnalisme media.

Target *proxy war* selanjutnya adalah disintegrasi bangsa yang dimulai dari Papua. Internasionalisasi dari gerakan Operasi Papua Merdeka (OPM) memiliki signifikansi besar dalam *proxy war*. Isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua menjadi sorotan dunia internasional. Isu ini juga disorot negara-negara Melanesia seperti Vanuatu, Fiji, Nauru, Pulau Marshall, serta Pulau Solomon dan Palau. Hal ini juga didukung oleh gerakan *civil society* yang mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua (Karim, 2022). Melalui isu Papua, Indonesia dianggap tidak konsisten dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi. Ditambah lagi, gambaran Prabowo sebagai Pemimpin politik ke depan yang penuh kontroversial. Gerakan kelompok penekan dari *nonstate actor* akan membesar dan menciptakan instabilitas politik dalam negeri. Mereka akan mempertanyakan komitmen pemerintah akan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang telah disepakati sejak reformasi. Momen ini bisa dimanfaatkan oleh Amerika Serikat sebagai *proxy war* dengan menggunakan penilaian demokrasi untuk melemahkan suatu bangsa.

Krisis Ekonomi

Tidak bisa dihindari bahwa konflik politik global akan mempengaruhi ekonomi. Konflik Ukraina-Rusia berimplikasi kepada harga gandum di seluruh dunia, mengingat Ukraina adalah negara penghasil gandum dunia. Di Eropa, harga gandum di bursa saham Eropa naik hingga 8,2% (detikNews, 2023). Sementara, konflik Israel-Palestina berimplikasi terhadap harga minyak. Setelah pecah konflik Israel-Palestina, harga minyak naik 4%, bahkan lebih dari 5% dalam kenaikan tertinggi (CNBC Indonesia, 2023). Kenaikan harga minyak ke depan mungkin akan berlipat-lipat karena konflik dua wilayah di dataran yang berbeda dan berlangsung bersamaan.

Tantangan ke depan, Indonesia akan terdampak krisis ekonomi dari dua sisi. Pertama, krisis pangan dan energi yang berasal dari konflik di Eropa dan Timur Tengah. Selama ini, Indonesia sedang memulihkan ekonomi pasca Covid-19 yang belum selesai. Perlu diketahui bahwa saat Covid-19 melanda dunia, negara-negara penghasil pangan banyak menutup diri karena kekurangan pasokan pangan. Sementara, Indonesia masih lemah dalam kedaulatan pangan. Sebab, Indonesia masih banyak mengimpor komoditas impor dan belum mampu lagi melakukan swasembada pangan. Dalam catatan sejarah, Indonesia sempat mampu swasembada pangan tahun 80-an hingga mendapat penghargaan pangan dari *Food Agricultural Organization* (FAO) tahun 1986. Setelah itu, Indonesia kembali melakukan impor hingga reformasi yang bahkan dilakukan secara ugaltugalan.

Indonesia harus siap dengan ditutupnya keran impor yang berasal dari negara lain karena persoalan konflik atau bencana yang tidak diketahui ke depan. Dalam prediksi tahun 2050, akan ada tambahan penduduk sejumlah 2,32 milyar jiwa di seluruh dunia. Sementara, terjadi banyak alih lahan saat ini untuk kepentingan infrastruktur, perumahan, maupun industri (Mudrieq, 2014). Tantangan ekonomi pangan dan energi akan jauh semakin sulit untuk dua dekade ke depan karena laju pertumbuhan jumlah penduduk. Situasi ini akan membuat perekonomian Indonesia menjadi sulit dan bisa menghasilkan krisis multidimensional. Jika pemerintah tidak pandai mengelola ekonomi, maka ancaman bahaya krisis pangan dan energi akan mempengaruhi ke segala bidang.

Kedua, Indonesia dihadapkan pada persoalan ekonomi moneter yang semakin memburuk. Laporan Dollar ke Rupiah per 4 Juni 2024 menunjukkan Rp16.224,75 per \$1 yang diakibatkan situasi perang di berbagai belahan dunia. Kondisi ini mengingatkan seperti yang terjadi pada tahun 1998 di mana dollar melambung hingga ke angka yang kurang lebih sama seperti laporan itu. Tahun 1998 terjadi krisis moneter yang menciptakan ketidaksabilan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi tersebut menghasilkan krisis multidimensional di berbagai sector sehingga mengakhiri pemerintahan orde baru (Adhari, 2020).

Dua sisi krisis ini bisa menimbulkan pengaruh besar dalam ekonomi Indonesia. Situasi perang yang terjadi di Ukraina dan Palestina dalam jangka

waktu yang panjang mampu memberikan stimulus krisis dunia. Indonesia akan terkena dampaknya dan jatuh ke dalam jurang resesi yang dalam jika pemerintah tidak mampu menata ekonomi ke depan. Momen kepemimpinan baru dari Pemilu 2024 harus bisa menyelesaikan persoalan ini jika ingin menciptakan resiliensi ekonomi.

KESIMPULAN

Fenomena politik global di belahan Eropa dan Timur Tengah yang terjadi saat ini tidak bisa dihindari. Dampak konflik itu berpengaruh ke seluruh dunia, mulai dari ekonomi hingga persoalan politik, bahkan skala konfliknya bisa berpotensi meluas. Melihat fenomena tersebut, Indonesia tidak akan bisa melepaskan diri dari persoalan politik global ini.

Dengan semakin meruncingnya perseteruan blok antara Barat dan Timur, Indonesia harus siap menghadapi konsekuensi politik global ini. Kepemimpinan Indonesia yang baru setelah Pemilu 2024 akan disorot oleh negara-negara blok secara serius. Mereka tentu akan mengamati ke arah mana haluan politik Indonesia ke depannya dan bagaimana merebut pengaruhnya.

Dari tiga tantangan Indonesia yang telah dipaparkan penulis, dapat ditunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami persoalan yang serius. Politik luar negeri Indonesia dalam menyikapi kondisi politik global akan menjadi perhatian dunia. Sementara, urusan dalam negeri Indonesia berpotensi mengalami kerentanan. Indonesia akan menghadapi permasalahan multiaspek dari sisi proxy war dan krisis ekonomi yang begitu kompleks sehingga bisa memicu instabilitas politik.

Jika pemerintah tidak mampu mengelola konflik dan tantangan yang dihadapi, resiko guncangan sosial yang membahayakan Indonesia akan kerap kali terjadi. Sebaliknya, jika pemerintah berhasil mengelolanya, Indonesia akan menjadi negara-negara yang diperhitungkan, serta memiliki daya tawar besar untuk dunia. Dalam kondisi yang sulit seperti ini, Pemerintah Indonesia harus bisa “berselancar” di tengah terpaan “ombak” politik dunia yang begitu besar.

Upaya itu tampaknya bisa dilakukan jika Indonesia memperkuat kedaulatan dan tetap konsisten nonblok antara Barat dan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A. (2020). Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian dari Keadaan Bahaya di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, Vol. 12 (1), 11-48.
- Andika, M. T. (2016). An Analysis of Indonesia Foreign Policy Under Jokowi's Pro-People Diplomacy. *Indonesian Perspective*, Vol. 1 (2).
- Annur, C. M. (2024, Februari 13). *Indonesia, Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia pada 2023*. Retrieved from databoks katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/13/indonesia-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia-pada-2023#:~:text=Tak%20hanya%20unggul%20sebagai%20produsen,juta%20metrik%20ton%20pada%202023.>
- Brunk, I. (., & Hakimi, M. (2022). Russia, Ukraine, and the Future World Order. *American Journal of International Law* 116 (4), 687-697.
- CNBC Indonesia. (2023, Oktober 13). *Prediksi Harga Minyak Usai Perang Israel-Hamas, Setinggi Apa?* Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231012170806-128-480088/prediksi-harga-minyak-usai-perang-israel-hamas-setinggi-apa>
- CNN Indonesia. (2024, Mei 3). *Daftar Negara yang Ancam dan Sudah Putus Hubungan dengan Israel*. Retrieved from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240502161803-120-1093156/daftar-negara-yang-ancam-dan-sudah-putus-hubungan-dengan-israel>
- detikNews. (2023, Juli 20). *Harga Gandum Melonjak Usai Rusia Ancam Serang Kapal ke Ukraina*. Retrieved from news detik:

<https://news.detik.com/bbc-world/d-6832642/harga-gandum-melonjak-usai-rusia-ancam-serang-kapal-ke-ukraina>

- Gunawan, I. (n.d.). *Kuantitatif Vs Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Hidayat, S., & Gunawan, W. (2017). Proxy War dan Keamanan Nasional Indonesia: Victoria Concordia Crescit. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7 (1).
- Karim, M. F. (2022). Role Conflict in International Relations: The Case of Indonesia's Regional and Global Engagements. *Sage*, 1-21.
- Kemnaker. (2024, januari 18). *Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2021 - 2023*. Retrieved from Satudata Kemnaker:
<https://satudata.kemnaker.go.id/infografik/59#:~:text=Berdasarkan%20kegiatannya%2C%20angkatan%20kerja%20meliputi,pada%20periode%202021%20s.d.%202023>.
- Kennedy, P. S. (2023). Dampak Perang Rusia-Ukraina Terhadap Perekonomian Global. *Fundamental Management Journal*, 8 (2).
- Kumar, R. (1997). *Non-Alignment Policy of Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Morgenthau, H. J. (2009). Six Principles of Political Realism. In R. J. Art, & R. Jervis, *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*. New York: Pearson/Longman.
- Mudrieq, S. H. (2014). Problematika Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 6 (2).
- Saputra, F. L. (2023, April 24). *Belanja Militer Dunia Tahun 2022 Membengkak*. Retrieved from Kompas.id:
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/04/24/belanja-militer-dunia-membengkak>
- Tim DetikNews. (2024, Maret 21). Hasil Lengkap Pemilu 2024: Pemenang Pilpres dan Daftar Parpol ke DPR.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024, May 20). *Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #168*.

Retrieved from [ochaopt.org](https://www.ochaopt.org) :

<https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-168>

World Bank Economic Monitoring Report. (2024). *Note on the Impacts of the Conflict in the Middle East on the Palestinian Economy*. World Bank.